

**ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
UNGGULAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
DI KOTA SURAKARTA**



Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

TIA ASTIARTIE

NIM. F0106076

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2010

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul:

ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR-SEKTOR EKONOMI
UNGGULAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
DI KOTA SURAKARTA

Surakarta, Mei 2010

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Drs. Hari Murti, M.Si

NIP. 19561214 198403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Surakarta, Mei 2010

Tim Penguji Skripsi

1. Drs. SUPRIYONO, M.Si sebagai Ketua Penguji
(.....)
NIP. 19600221 198601 1 001
2. Drs. HARI MURTI, M.Si sebagai Pembimbing
(.....)
NIP. 19561214 198403 1 001
3. Drs. SUTANTO, M.Si sebagai Anggota Penguji
(.....)
NIP. 19561129 198601 1 001

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

→ *Semuanya akan lebih berarti apabila disyukuri...* **ALHAMDULILLAH**

→ *Be a good girl*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati,
Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- **Orangtuaku**
- **Obhi**
- **Pembimbing dan Penguji ku**
- **Ekonomi Pembangunan**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala karunia dan limpahan rahmadnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS KEBUTUHAN INVESTASI SEKTOR-SEKTOR**

EKONOMI UNGGULAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA SURAKARTA.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Hari Murti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan dan waktunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
2. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Akt. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan segenap Pembantu Dekan serta jajarannya yang duduk di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Kresno Sarosa Pribadi, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi.
4. Izza Mafruhah, SE., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan.
5. Drs. Supriyono, M.Si dan Drs. Sutanto, M.Si selaku tim penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi dapat lebih baik.

6. Drs. Mulyanto, ME Selaku Pembimbing Akademik yang selalu membantu penulis selama menempuh study di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Sumardi, SE selaku Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
8. Riwi Sumantyo, SE., ME selaku Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen terhormat beserta seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pelajaran kepada penulis, terima kasih atas semua ilmu yang kalian berikan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya baik moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran sangat penulis harapkan demi

sempurnanya tulisan ini. Akhirnya harapan penulis semoga karya ini bermanfaat bagi semuanya.

Surakarta, April 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN.....	
ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v DAFTAR
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv ABSTRAI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pembangunan Ekonomi	11
1. Arti Dan Maksud Pembangunan Ekonomi	12
2. Investasi dalam Pembangunan	14
3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	19
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi	23
1. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar	26
2. Teori Basis Ekonomi	33
C. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	35
1. Karakteristik Perencanaan Pembangunan Ekonomi	35

2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah	37
3. Perencanaan Tenaga Kerja	40
D. Penelitian Terdahulu	40
E. Kerangka Pemikiran	
44	
F. Hipotesis	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Ruang lingkup Penelitian	46
B. Sumber Data	46
C. Definisi Operasional Variabel	46
1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	
46	
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi	47
3. Investasi	
47	
4. Kesempatan Kerja	
48	
D. Metode Analisis Data	
49	
1. LQ (<i>Location Quotient</i>)	
50	

2. DLQ	(<i>Dynamic Locatin Qoutient</i>)	51
3. ICOR	(<i>Incremental Capital Output Ratio</i>)	53
4. <i>Trend Linear</i>		55
5. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja		57

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian	58
1. Keadaan Geografis Kota Surakarta	58
2. Kependudukan	60
3. Pendidikan	63
4. Ketenagakerjaan	64
5. Kondisi Ekonomi	66
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	69
1. Analisis LQ (<i>Location Quotient</i>)	69
2. Analisis DLQ (<i>Dynamic Location Quotient</i>)	71
3. Analisis ICOR (<i>Incremental Capital Output Ratio</i>)	75
4. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja	82

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

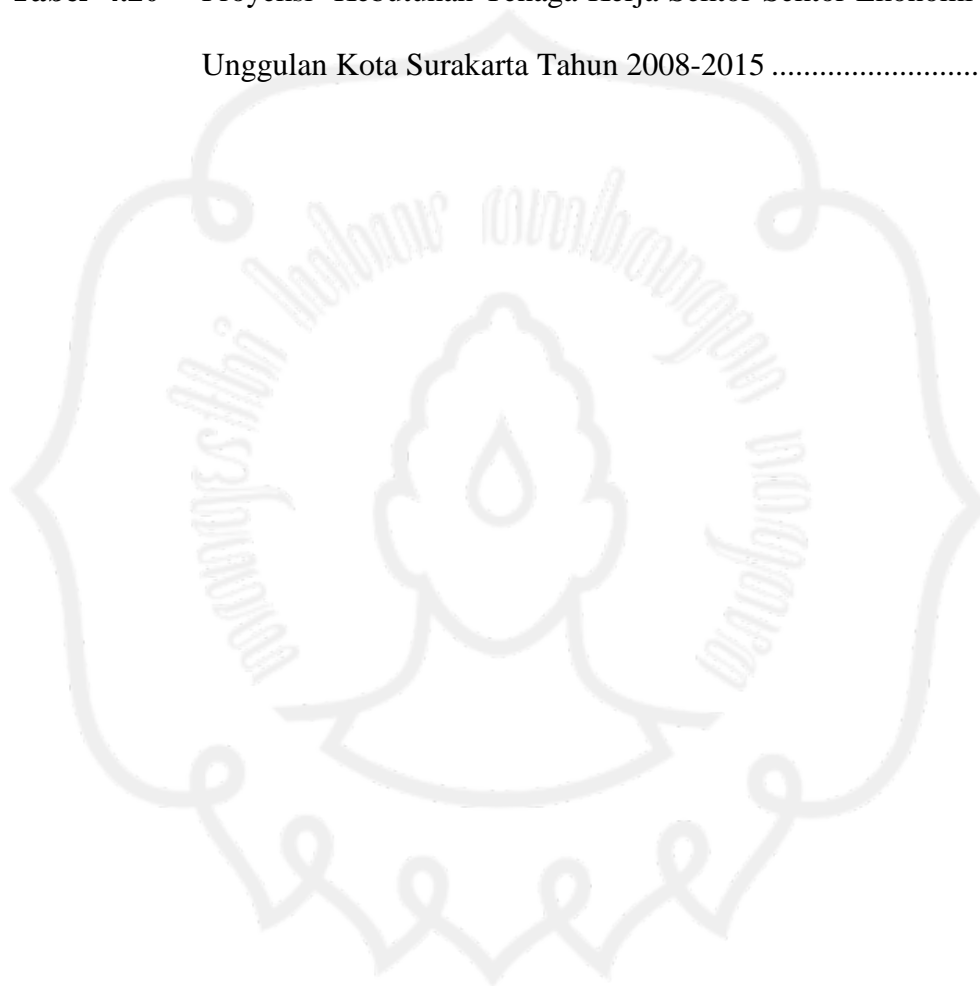
DAFTAR TABEL

TABEL

	Halaman
Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surakarta Tahun 2003 – 2007	6
Tabel 4.1 Persentase Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta berdasar penggunaannya tahun 2007.	59
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003–2007.....	60
Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2003-2007.....	61
Tabel 4.4 Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007 (berdasarkan hasil SUSENAS 2007).	62
Tabel 4.5 Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2003-2007.....	63

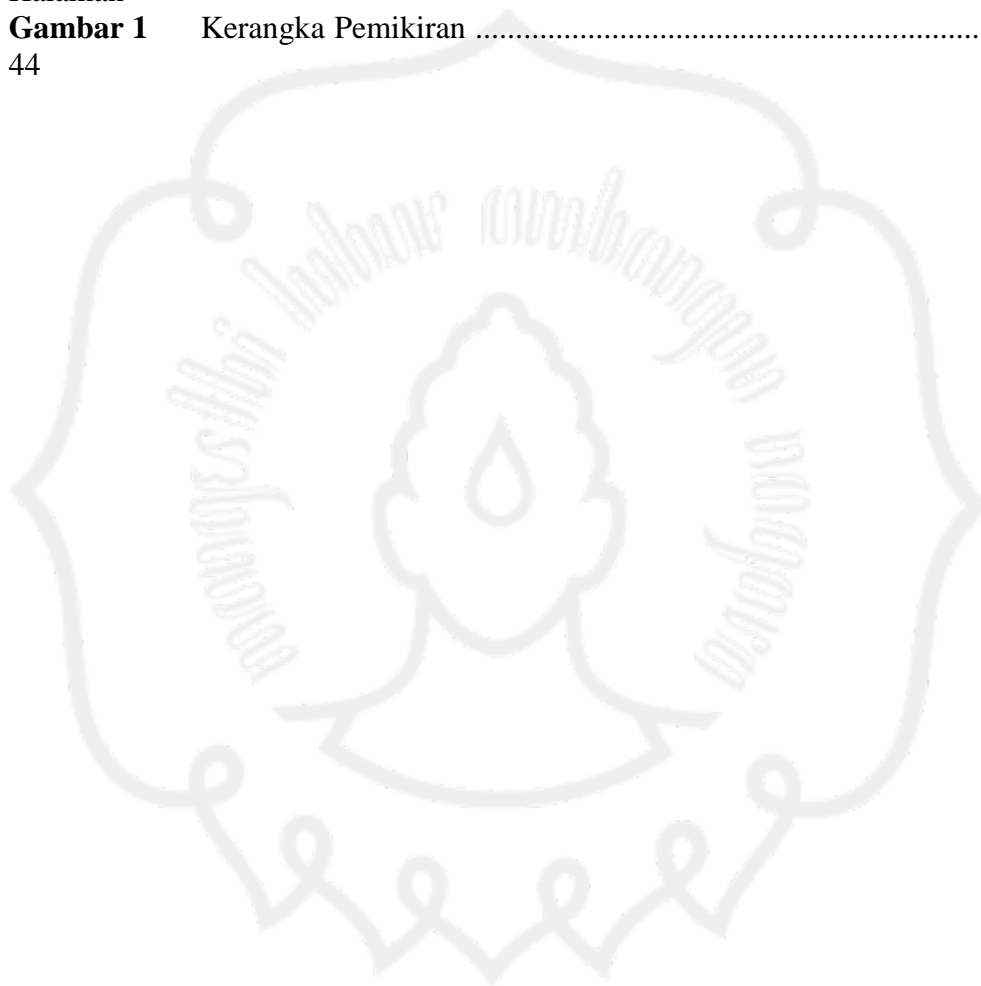
Tabel 4.6	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2007.	64
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin Di Kota Surakarta Tahun 2007.....	65
Tabel 4.8	Banyaknya Penduduk menurut Menurut Mata Pencapaian di Kota Surakarta Tahun 2007.	66
Tabel 4.9	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 2003-2007 (Persen).....	68
Tabel 4.10	Perhitungan <i>Location Quotient</i>	69
Tabel 4.11	Perhitungan <i>Dynamic Location Quotient</i>	72
Tabel 4.12	Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif.....	74
Tabel 4.13	Perhitungan <i>Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)</i>	76
Tabel 4.14	Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp).	77
Tabel 4.15	Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp).	78
Tabel 4.16	Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp).....	78
Tabel 4.17	Kebutuhan Investasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp).	80

Tabel 4.18	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2007.....	83
Tabel 4.19	Jumlah Lowongan Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2007.....	84
Tabel 4.20	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kota Surakarta Tahun 2008-2015	84



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	
Halaman	
Gambar 1	Kerangka Pemikiran
44	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007 (Juta Rp)	92
Lampiran 2	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2003-2007 (Juta Rp)	93
Lampiran 3	Perhitungan DLQ Tahun 2003-2007 (Persen)	94
Lampiran 4	Perhitungan <i>Trend Linear</i>	97
Lampiran 5	Perhitungan ICOR Tahun 2004 – 2007	98
Lampiran 6	Perhitungan Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Tahun 2008-2015	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan nasional. Salah satu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi daerah yaitu adanya pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu diketahui terlebih dahulu sumberdaya-sumberdaya atau potensi suatu daerah yang diharapkan dapat berkembang secara optimal. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut.

Otonomi daerah ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang, yaitu UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU. No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 33 Tahun 2004. Lahirnya undang-undang tersebut diharapkan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-

praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat rendahnya potensi sektor tertentu dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Era otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya dalam memberdayakan daerah termasuk kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan demi tercapainya kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dengan demikian suatu daerah sangat memerlukan beragam data yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah yang

telah dilaksanakan maupun dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang.

Perencanaan dianggap sebagai sebuah alat untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi dan mempersiapkan suatu landasan ekonomi yang kuat bagi perkembangan pembangunan ekonomi selanjutnya salah satu strategi dalam perencanaan pembangunan adalah mengetahui sektor unggulan yang menjadi potensi daerah dengan memanfaatkannya sehingga dapat dijadikan skala prioritas dalam pembangunan karena sektor unggulan adalah sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di tingkat nasional. Dimana jika sektor unggulan dikembangkan melalui investasi maka produksi akan meningkat, sektor unggulan menjadi orientasi ekspor sehingga sektor lain dapat berkembang dan kesempatan kerja bertambah yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Sadono (1976:134), sektor unggulan dapat pula disebut sebagai sektor yang dapat di ekspor ke daerah lain karena kegiatan sektor unggulan menghasilkan produk/jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah (ekspor) dan perkembangan ekspor dapat menjadi motor penggerak dalam pembangunan ekonomi. Sumbangan sektor ekspor dalam pembangunan secara langsung adalah: (i) kenaikan dalam jumlah ekspor memungkinkan sesuatu daerah untuk menaikan jumlah impor, termasuk impor barang modal yang penting peranannya dalam pembangunan ekonomi: (ii) dengan

mengembangkan sektor ekspor maka dana pembangunan yang tersedia akan dialirkan ke dalam sektor yang paling efisien, yaitu sektor penghasil barang ekspor, yang mampu bersaing dengan sektor yang sama di tingkat nasional; (iii) kegiatan ekspor akan memperluas pasar untuk produksi dalam wilayah dan memungkinkan perluasan skala produksi sektor industri dan selanjutnya menciptakan *economies of scale*; dan (iv) karena perusahaan-perusahaan harus tetap mempertahankan kedudukan yang *competitive* dalam pasar maka mereka harus berusaha untuk menekan ongkos produksi dan mempertinggi efisiensi kegiatannya.

Sumbangan tidak langsung dari sektor ekspor dalam pembangunan dapat dibedakan dalam tiga golongan. Pertama, ekspor akan mendorong dan meningkatkan perkembangan penanaman modal dari dalam maupun luar daerah karena sektor industri mengalami perluasan pasar sebagai akibat dari perkembangan sektor ekspor. Kedua, perkembangan sektor ekspor akan memudahkan masuknya inovasi dan teknologi, dan keahlian usahawan. Industri-industri akan terdorong untuk mengimpor teknologi baru dari luar untuk mempertahankan kedudukannya. Dan ketiga, dengan adanya barang-barang yang dapat di impor dari luar daerah maka, variasi barang yang ada semakin banyak dan akan mendorong pertambahan konsumsi.

Pelaksanaan pembangunan harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran-sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan citra Kota Surakarta dengan membangun sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta. Dalam usaha mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang ditetapkan atau diidentifikasi tentu diperlukan sumber pembiayaan atau investasi yang cukup, sehingga diperlukan perhitungan kebutuhan investasi terhadap masing-masing sektor ekonomi unggulan.

Iklm investasi yang baik akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yakni melalui investasi yang didukung oleh produktivitas yang tinggi. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input ke dalam proses produksi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik investor, selain makroekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam arti luas. Kondisi inilah yang mampu menggerakkan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi (ICOR Kabupaten Bandung, 2008:1).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Harrod-Domar yang dikutip oleh Jhingan (1988:291) mengemukakan bahwa investasi merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebab investasi dapat menciptakan pendapatan dan dapat memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Kegiatan investasi merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembangunan karena investasi dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, yang diharapkan dari investasi adalah dampak yang ditimbulkan dari investasi terhadap pembangunan wilayah regional maupun nasional.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengetahui potensi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi neto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Distribusi persentase PDRB Kota Surakarta disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu: pertanian; pertambangan ; industri ; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surakarta Tahun 2003 – 2007

SEKTOR EKONOMI	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	-11,62	-2,37	0,88	1,20	1,54
Pertambangan	4,45	-0,72	3,34	-0,21	2,31
Industri	6,70	6,07	1,47	2,55	3,46
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,64	7,61	4,45	9,25	5,56
Bangunan	7,05	1,44	8,24	5,85	9,64
Perdagangan, Hotel & Restoran	6,45	8,01	7,58	6,93	6,36
Pengangkutan dan Komunikasi	5,02	6,13	5,48	5,96	6,00
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,86	5,65	6,74	6,20	5,93
Jasa-Jasa	6,98	5,45	4,79	6,97	6,20
PDRB	6,11	5,80	5,15	5,43	5,82

Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2007

Pertumbuhan tertinggi dari Pertumbuhan sektor ekonomi Kota Surakarta berdasarkan Tabel 1 berasal dari sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dengan pertumbuhan rata-rata 7,06 persen meskipun menunjukkan kecenderungan yang menurun, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran merupakan sektor unggulan di Kota Surakarta. Pertumbuhan sektor terendah berasal dari sektor Pertanian dengan nilai pertumbuhan rata-rata negatif yaitu sebesar -2,07 persen yang dipengaruhi oleh industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan industri dan perumahan penduduk.

Todaro (2000:137) menjelaskan bahwa salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*), yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan bahan baku meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik suatu negara dan hal itu jelas memungkinkan akan terjadinya peningkatan *output* di masa-masa mendatang.

Berdasarkan Kompas (16 februari 2006), Geliat pertumbuhan ekonomi kini terlihat di Kota Solo. Dengan dukungan Pemerintah Kota Solo yang terus berupaya membangun Kota Solo menjadi kota wisata.. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi karena investasi di bidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.

Modal digunakan dalam produksi untuk menambah *output*. Modal terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masa yang akan datang. Modal sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi meliputi investasi pengetahuan teknologi, perbaikan dalam pendidikan, dan keahlian. Dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang peranan dari modal yang menaikkan produktivitas tidak saja berujud pabrik-pabrik dan perlengkapan lainnya, tetapi juga berujud sebagai *human capital*.

Menurut Jhingan (1988:88), Pembentukan modal membawa ke arah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi pada gilirannya membawa ke arah spesialisasi dan penghematan produksi skala luas. Pembentukan modal membantu usaha penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga buruh semakin meningkat. Melalui pembentukan modal ini pula akan membawa ke arah penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

Pentingnya menarik investor untuk menanamkan modalnya karena salah satu sumber pertumbuhan ekonomi adalah investasi, kegiatan investasi dapat berupa investasi untuk kegiatan baru ataupun perluasan dari usaha yang telah ada. Hal ini sekaligus akan menambah lapangan pekerjaan dimana investasi pada sektor basis lebih diutamakan karena lebih efisien. Sehingga dengan adanya investasi akan mempengaruhi jumlah kesempatan kerja yang tersedia di Kota Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta ?
2. Seberapa besar kebutuhan investasi untuk masing-masing sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta ?
3. Berapakah kesempatan kerja yang terserap berdasarkan target investasi untuk masing-masing sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan investasi masing-masing sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui kesempatan kerja yang terserap berdasarkan target investasi untuk masing-masing sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta.

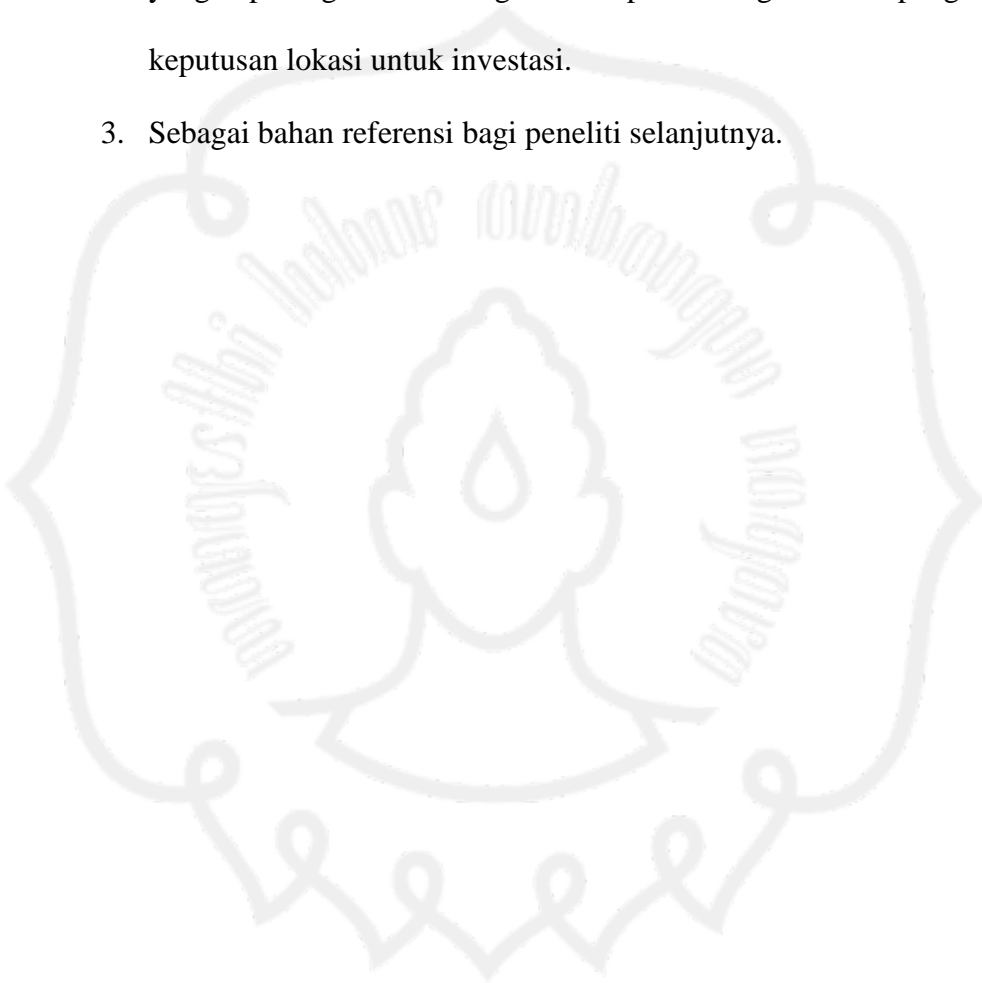
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta

sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.

2. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi mengenai potensi investasi bagi masyarakat (swasta) sebagai investor yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lokasi untuk investasi.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Ekonomi Pembangunan

Menurut Suryana (2000:1), Pengertian dan ruang lingkup ekonomi pembangunan adalah usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Usaha-usaha pembangunan diarahkan pada perbaikan tingkat hidup, harga diri dan kebebasan. Dimensi pembangunan berorientasi pada perhatian untuk mengatasi keterbelakangan dalam bentuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Dalam Ilmu ekonomi pembahasannya selalu berkaitan dengan efisiensi dari alokai-alokasi sumber-sumber produktif yang langka dan pertumbuhan yang optimal dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa lebih besar. Sedangkan, ekonomi pembangunan berkaitan dengan alokasi sumber-sumber produktif yang langka dan pertumbuhannya dengan efisiensi, juga bersangkut paut dengan formulasi kebijaksanaan pemerintah di antaranya dengan melibatkan variabel-variabel ekonomi secara langsung seperti *income*, investasi, dan kesempatan kerja (*employment*). Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk

menganalisis masalah yang dihadapi negara-negara sedang berkembang dan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut supaya dapat membangun ekonominya lebih cepat.

1. Arti dan Maksud Pembangunan Ekonomi

Suryana (2000:3) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi ini mengandung tiga unsur:

- a. Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus-menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru.
- b. Usaha meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Perkembangan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan pendapatan per kapita merupakan suatu pencerminan dari perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Namun dalam hal menentukan sasaran dalam pembangunan lebih penting karena kebijaksanaan ekonomi yang telah berhasil akan mempengaruhi kebijaksanaan non-

ekonomi dan dapat dikatakan baik fisik realita maupun keadaan fikiran yang dimiliki oleh masyarakat mencakup usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh sebab itu sasaran pembangunan yang harus ada menurut Todaro (1983: 1280) adalah:

- a. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan dan lingkungan.
- b. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
- c. Memperluas jaringan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas strategi pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada:

- a. Meningkatkan *output* nyata/produktivitas yang tinggi yang terus-menerus meningkat. Karena dengan *output* yang tinggi ini akhirnya akan dapat meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian bahan

kebutuhan pokok untuk hidup, termasuk penyediaan rumah, pendidikan, dan kesehatan.

- b. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi dan pengangguran yang rendah yang ditandai dengan tersedianya lapangan kerja yang cukup.
- c. Pengurangan dan pemberantasan ketimpangan.
- d. Perubahan sosial, sikap mental, dan tingkah laku masyarakat dan lembaga pemerintah.

2. Investasi dalam Pembangunan

Menurut Suryana (2000:35) dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar menaikkan permintaan uang, akan tetapi juga menaikkan output riil. Untuk mengukur banyaknya kapital yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Perkiraan tingkat pertumbuhan produksi.
- b. Target kenaikan pendapatan per kapita riil.
- c. Angka rasio pertumbuhan investasi dan output (ICOR).

Pemilihan arah dan sasaran investasi akan menjamin efisiensi kegiatan ekonomi. Oleh karena itu untuk mengalokasikan kapital terlebih dahulu harus diadakan kriteria arah investasi. Tujuan alokasi investasi, tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi juga untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, keadaan sosial dan kebudayaan, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta selera dalam

kemajuan teknologi. Kriteria tersebut bersifat dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Beberapa prinsip petunjuk kriteria itu, adalah:

- a. Investasi harus diarahkan kepada penggunaan yang paling produktif, sehingga *Ratio Current Output Ratio* (COR) diturunkan.
- b. Investasi harus dijalankan dalam proyek padat karya yaitu proyek yang memperbesar *the labor investment ratio*.
- c. Proyek investasi harus diseleksi agar menghasilkan barang-barang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dan memperluas eksternal *economic*, dan
- d. Investasi harus dijalankan pada industri yang menyerap valuta asing, mengurangi tekanan neraca pembayaran dan memperbesar *the ratio of export goods to investment*.

Tujuan pokok pembangunan ekonomi ialah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor ekonomi. Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Jadi, pembentukan modal juga mampu menciptakan kesempatan kerja.

Menurut Jhingan (1988:59) Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis di dalam proses pembangunan ekonomi.

Pembentukan modal disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Di satu pihak pembentukan modal mencerminkan permintaan efektif dan di pihak lain menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Proses pembentukan modal melewati tahap sebagai berikut:

- a. Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
- b. Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan.
- c. Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan.

Pembentukan modal dimana masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal seperti: perkakas dan alat-alat, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya serta segala macam bentuk modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Inti proses itu kemudian ialah pengalihan sebagian sumberdaya yang sekarang ada pada masyarakat ke tujuan untuk meningkatkan persediaan barang modal sehingga memungkinkan perluasan *output* yang dapat dikonsumsi pada masa depan (Jhingan, 1988:419).

Pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor di dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan dapat

dipotong dengan pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya pendapatan maka permintaan, produksi dan investasi menjadi rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal. Melalui pembentukan modal persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat, skala produksi meluas, *overhead* ekonomi dan sosial tercipta. Pembentukan modal membawa ke pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada. Jadi pembentukan modal menghasilkan kenaikan besarnya output nasional, pendapatan dan pengerjaan, dengan demikian memecahkan masalah inflasi dan neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari beban utang luar negeri.

1) Pengertian investasi

Sukirno (2003:107) mengartikan investasi sebagai pengeluaran atau perbelanjaan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan modal memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah/mempertahankan persediaan kapital dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, kantor dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Tujuan dari investasi adalah mengeluarkan dana pada saat sekarang dengan harapan akan

memperoleh hasil dimasa yang akan datang. Perkembangan ekonomi meliputi proses pembentukan kapital yang terus-menerus untuk menambah alat-alat produksi. Dimana keadaan masyarakat harus memungkinkan adanya akumulasi kapital, yaitu dengan mengadakan investasi yang diambilkan dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi.

2) Peranan Investasi

Dalam pandangan Keynes investasi mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai determinan *employment* dan pendapatan. Kesempatan kerja dalam suatu masyarakat bergantung pada jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat tersebut, dan kurangnya investasi akan menimbulkan pengangguran (*un-employment*).

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja, sehingga pendapatan masyarakat bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah material, tenaga kerja dan demikian seterusnya bagi faktor-faktor produksi yang lain (Sobri, 1987:13).

3) Macam-macam Investasi

Macam-macam investasi berdasarkan pelaku investasi dapat dibedakan sebagai berikut (Sobri, 1987: 145) :

a) Investasi Pemerintah (*Public Investment*)

Public Investment umumnya dilakukan tidak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), seperti jalan raya, rumah sakit, pelabuhan dan sebagainya.

Investasi-investasi seperti ini sering disebut dengan *social overhead capital (SOC)*. Keuntungan bagi investasi-investasi ini baru terasa apabila muncul pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, yang juga menaikkan pendapatan, akan memberikan keuntungan bagi investasi publik.

b) Investasi Swasta (*Private Investment*)

Private Investment adalah jenis investasi yang dilakukan oleh swasta dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan (laba), dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Apabila pendapatan bertambah dan pada akhirnya bertambah pula *effective demand*. Investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang bersumber pada penambahan pendapatan mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

3. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam pembahasan pembangunan ekonomi daerah lebih dahulu perlu dijelaskan mengenai pengertian daerah dari aspek ekonomi, dimana daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Arsyad, 1999:107) :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya, sosial-budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.
- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Di dalam membahas mengenai pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah, pengertian ketiga merupakan pengertian yang paling banyak digunakan. Penggunaan pengertian tersebut dikarenakan dua faktor antara lain, pertama dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan dari badan pemerintahan dan dengan demikian menjadi lebih praktis apabila suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang telah ada. Kedua, daerah yang batasannya ditentukan berdasarkan satuan administratif

lebih mudah dianalisa karena sejak lama pengumpulan data berbagai daerah dalam satu negara pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam daerah tersebut (Arsyad, 1999: 108).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan inistitusi-institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah lebih untuk memberikan kesempatan kerja untuk penduduk yang ada sekarang ketimbang menarik para pekerja baru. Kedua, mencapai stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber keuangan, infrastruktur, dan sebagainya). Ketiga adalah mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan kerja masyarakat (Arsyad, 1999:122).

Dalam proses perkembangan daerah perlulah diusahakan agar kegiatan ekonomi daerah menjadi bertambah melebar dan kukuh. Keadaan ini dapat diciptakan dengan cara mempertinggi peranan sektoral dan memodernkan keseluruhan kegiatan ekonomi. Usaha ini perlu untuk

mencapai dua tujuan. Pertama, langkah tersebut perlu untuk menjaga agar jenis ekspor diperbanyak dan dengan demikian dapat mengurangi goncangan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di luar daerah terhadap perekonomian daerah tersebut, terutama perubahan yang secara langsung mempengaruhi ekspor daerah tersebut.

Dan kedua, dengan perkembangan perekonomian daerah tersebut maka lebih banyak pengeluaran akan dilakukan apabila pertambahan permintaan ini dapat dipenuhi oleh daerah tersebut maka efek *multiplier* yang diciptakan oleh sektor ekspor akan bertambah besar. Dengan demikian pertambahan pendapatan yang diakibatkan oleh pertambahan ekspor akan menjadi lebih besar pula.

Langkah lain yang perlu dilakukan untuk memperbesar efek *multiplier* sektor ekspor adalah memperbesar partisipasi dari modal daerah tersebut dalam pengembangan sektor ekspor karena hal itu dapat mengurangi pengaliran pendapatan dan keuntungan keluar daerah dan selanjutnya akan memperbesar pendapatan masyarakat di daerah yang akhirnya akan memperbesar efek *multiplier* dari perkembangan sektor ekspor (Sadono, 1976: 147).

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (1988:72) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud

dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Todaro, 2000:137):

- Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (*human resources*), akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang.

Akumulasi modal akan menambah sumberdaya-sumberdaya yang baru dan akan meningkatkan sumberdaya-sumberdaya yang telah ada. Untuk mencapai investasi tersebut dituntut adanya pertukaran antara konsumsi sekarang dan konsumsi mendatang. Artinya, pihak-pihak pelaku investasi harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi mereka pada saat sekarang demi memperoleh konsumsi yang lebih baik di kemudian hari.

- Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan

ekonomi, namun kemampuan merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja yang ada secara produktif.

- **Kemajuan Teknologi**

Menurut para ekonom terutama teknokrat, kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional.

Kemajuan teknologi juga dapat meningkatkan modal atau tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja terjadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau ketampilan angkatan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal terjadi jika penggunaan teknologi dengan memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Sumber kemajuan ekonomi bisa meliputi berbagai macam faktor, akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi.

1. Teori pertumbuhan Harrod-Domar

Harrod Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi dapat menyisihkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Sehingga diperlukan tambahan stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru.

Menurut Harrod Domar ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal(K) dan jumlah produksi nasional (Y). Teori yang dikembangkan adalah konsep *capital output ratio* (COR) atau sering juga disebut koefisien modal menunjukkan hubungan antar besarnya investasi (modal) dengan nilai output .

Pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan dan diinvestasikan, makin tinggi pula output yang dihasilkan. Sedangkan hubungan antara COR dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif dimana semakin besar COR maka semakin rendah tingkat pertumbuhan output.

Dalam Arsyad (2000:234) Teori Harrod Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (*steady growth*).

Sukirno (1976: 131) mengemukakan dua aspek penting dalam teori Harrod-Domar dalam usaha untuk menyusun strategi pembangunan di negara sedang berkembang. Pertama, teori tersebut menekankan analisisnya pada syarat untuk mencapai penggunaan alat modal yang tersedia secara maksimal (*full capacity*). Pada umumnya negara sedang berkembang memiliki modal yang terbatas tetapi jumlah tenaga kerjanya sangat berlebihan, mengakibatkan *full capacity* dalam penggunaan alat modal sudah tercapai jauh sebelum kesempatan kerja penuh tercipta. Akibatnya pertumbuhan melebihi laju tingkat pertumbuhan yang dikehendaki sehingga perlu diperhatikan dalam menciptakan kebijaksanaan pembangunan.

Selanjutnya aspek kedua teori ini memberikan penjelasan dan menunjukkan tentang peranan modal dalam pembangunan dan sampai dimana pertumbuhan alat produksi akan menciptakan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan teori ini dapat menaksir besarnya jumlah dan tingkat investasi atau modal yang diperlukan pada suatu waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu.

Harrod-Domar memberikan peranan kunci pada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai sifat yang dimiliki oleh investasi yakni; pertama, investasi menciptakan pendapatan. Kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama disebut “dampak permintaan” dan yang kedua disebut “dampak penawaran” dari investasi. Karena itu selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata tetap berlangsung,

pendapatan nyata dan output akan senantiasa menyesuaikan. Baik pendapatan maupun output tersebut keduanya harus meningkat kedalam laju yang sama pada saat kapasitas produksi meningkat (Jhingan, 1988:291).

a. Pengertian konsep *Capital – Output Ratio*

Secara analistis COR berguna dalam menunjukkan arti penting modal di dalam pembangunan ekonomi dikemukakan oleh Arsyad (1999:244). COR merupakan konsep penting yang berguna bagi perencanaan ekonomi di Negara sedang berkembang. Pentingnya COR akan tampak ketika diuji konsistensinya antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal, dalam rangka memperkirakan kebutuhan keuangan untuk mencapai pertumbuhan diperlukan adanya perkiraan mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan output tersebut. Dengan demikian, COR dapat dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian.

Konsep COR ada 2 macam yaitu *average capital-output ratio* (ACOR) dan *incremental capital-output ratio* (ICOR). ACOR menunjukkan hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran output lancar yang dihasilkan. Sedangkan ICOR menunjukkan hubungan antara jumlah kenaikan output (pendapatan) ΔY yang disebabkan oleh kenaikan tertentu pada stok modal ΔK . ICOR dapat digambarkan sebagai $\Delta K/\Delta Y$.

ACOR menunjukkan hubungan antara segala sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini ditambahkan pada modal

atau pendapatan. ACOR merupakan konsep statis , sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah COR sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan dengan ICOR.

Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian. Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada sektor produksi yang menggunakan teknik produksi bersifat padat modal memiliki COR yang tinggi. Sebaliknya, pada sektor yang menggunakan teknik padat karya memiliki COR yang rendah. COR memberikan hasil yang lebih berarti dalam jangka panjang ketimbang dalam jangka pendek. Secara analitis COR berguna dalam menunjukkan arti penting modal di dalam pembangunan ekonomi (Aryad, 1999:251).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya COR

Besarnya COR pada suatu perekonomian tidak hanya tergantung pada jumlah modal yang dipergunakan tetapi juga pada faktor-faktor lain, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999:239-242) :

1) Ketersediaan sumberdaya alam dan pertumbuhan penduduk

Suatu daerah dengan sumberdaya alam yang melimpah akan mempunyai COR rendah, karena daerah tersebut menggantikan modal dengan sumber daya yang ada. Selain itu jika suatu daerah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan COR cenderung rendah, karena pertumbuhan penduduk menyebabkan tabungan modal yang besar pada prasarana sosial.

2) Tingkat dan sifat kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi terpacu karena banyaknya inovasi, maka COR cenderung meningkat. Sifat kemajuan teknologi berkaitan dengan inovasi padat modal dan padat karya. COR akan cenderung naik jika teknologi bersifat padat modal. Pada sisi lain, COR akan cenderung turun jika inovasi teknologi bersifat padat karya.

3) Laju dan komposisi investasi

Semakin tinggi laju investasi baru maka COR akan semakin tinggi pula. Pola investasi dalam suatu perekonomian tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Jika pemerintah merencanakan pengeluaran besar di bidang pelayanan umum dan barang publik maka COR akan tinggi. Hal yang sama juga akan terjadi jika pembangunan dilakukan di sektor-sektor industri dasar dan industri berat. COR akan rendah jika pola investasi lebih ditekankan pada pembangunan pertanian dan perindustrian rakyat yang padat karya.

4) Efisiensi penggunaan faktor produksi

Tingkat efisiensi yang rendah dalam menggunakan barang modal baru akan menyebabkan COR menjadi tinggi, sebaliknya jika tingkat efisiensi yang tinggi dalam penggunaan faktor produksi maka COR akan rendah.

5) Keterampilan Manajerial dan Organisasional

Dalam suatu daerah jika kualitas keterampilan manajerial dan organisasionalnya tinggi, memiliki COR rendah. Sebaliknya, jika

kuantitas dan kualitas kewiraswastaan rendah, maka COR akan tinggi. Semakin efisien penggunaan sumberdaya, terutama modal, maka akan menurunkan COR.

6) Kebijakan harga faktor produksi

Suatu perubahan harga (upah, suku bunga, sewa dan sebagainya) akan mempengaruhi besarnya COR. Penurunan suku bunga, dengan harga faktor produksi lainnya konstan, mungkin akan meningkatkan permintaan investasi akan modal sehingga menaikkan COR. Demikian pula dengan kenaikan upah, sementara hal-hal lainnya tetap sama. COR akan naik jika ada kemungkinan modal digantikan dengan tenaga kerja.

7) Kebijaksanaan Ketenagakerjaan

Kebijaksanaan pemerintah yang mengarah pada penyerapan pengangguran pada industri besar, khususnya industri manufaktur, maka COR akan lebih kecil. Hanya sedikit sekali modal dan tenaga kerja yang akan digunakan pada industri seperti itu bila dibandingkan dengan pekerjaan umum.

8) Kemajuan Industrialisasi

Kemajuan industrialisasi cenderung menaikkan COR. Industrialisasi menyebabkan urbanisasi, akibatnya COR terdorong naik dimana investasi yang diperlukan untuk pembangunan perumahan dan prasarana umum banyak membutuhkan modal.

9) Penggunaan prasarana sosial dan ekonomi

Pada tahap awal pembangunan ekonomi ada kecenderungan bahwa investasi lebih banyak ditanamkan pada pembangunan prasarana sosial dan ekonomi sehingga COR cenderung tinggi. Tetapi dengan berjalannya waktu, pemanfaatan prasarana sosial dan ekonomi secara maksimum akan menciptakan eksternalitas ekonomi dan menyebabkan kenaikan penghasilan. Selanjutnya menyebabkan pemanfaatan maksimal peralatan modal yang ada sehingga menaikkan output, dan akibatnya COR akan menurun.

c. *Incremental capital output ratio (ICOR)*

Teori Harrod-Domar menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Syarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh dalam jangka panjang. Pertumbuhan itu sendiri bisa direalisasikan dengan menetapkan tingkat efisiensi pembangunan lewat formula besaran ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) dimana menunjukkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan perhitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai

dan kebutuhan dana investasi yang diperlukan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi (ICOR Kab. Bandung, 2008:7).

2. Teori Basis Ekonomi

Dalam teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut (Arsyad, 1999:116).

Inti dari teori ekonomi basis adalah karena industry basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapat tersebut tidak hanya

menaikkan permintaan terhadap industry basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan *industry non basic* (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Pembangunan daerah pada permulaannya timbul sebagai akibat dari kesanggupan sesuatu daerah untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan mengekspornya dengan daya saing pada barang yang sama atau sejenis yang diproduksi daerah lain. Kesanggupan mengekspor (menghasilkan sektor basis) menciptakan pendapatan bagi daerah tersebut. Sehingga pembangunan daerah dapat terwujud dengan adanya pendapatan yang diperoleh dari sektor basis.

Oleh karena itu, industri basis-lah yang patut dikembangkan di suatu daerah. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah menggolongkan setiap industri apakah termasuk industri apakah termasuk industri basis atau non basis. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*Location Quotient, LQ*). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik *LQ* berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

C. Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Suryana (2000:117) menyatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan variabel-variabel ekonomi yang penting (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan, ekspor impor, dan lain sebagainya) suatu negara dalam rangka mencapai keputusan pendahuluan mengenai tujuan-tujuan pembangunan.

1. Karakteristik Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Conyers & Hills dalam Arsyad (1999:19) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan pembangunan ekonomi ini ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Inilah yang membedakan perencanaan pembangunan dengan perencanaan-perencanaan yang lain.

Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi:

- a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
- e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai *distributive justice*.
- f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.
- g. Usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Setiap perencanaan pembangunan ekonomi harus mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut :

- a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.
- b. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka tersebut berbagai variabel pembangunan dihubungkan serta implikasi dari hubungan tersebut.
- c. Perkiraan suberdaya-sumberdaya bagi pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan kendala yang strategis dalam pembangunan, sehingga perlu diperkirakan dengan seksama.
- d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijakan fiskal , penganggaran, moneter harga serta kebijakan sektoral lainnya.

- e. Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan secara bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.
- f. Perencanaan pembangunan adalah administrasi pembangunan yang mendukung usaha perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut.

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi alasan perlunya perencanaan pembangunan ekonomi adalah agar :

- a. Alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas lebih bisa efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan-pemborosan.
- b. Perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mantap dan berkesinambungan.
- c. Stabilitas ekonomi tercapai dalam menghadapi siklus konjungtur.

2. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan secara seimbang perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik dan sektor swasta petani, pengusaha kecil,

koperasi, pengusaha besar, organisasi-organisasi sosial harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (*economic entity*) yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain (Arsyad, 1999:127).

Perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan demikian menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan.

Adanya perencanaan pembangunan ekonomi daerah didasarkan pada adanya perbedaan perekonomian daerah dan perekonomian nasional. Dimana perekonomian daerah lebih terbuka dibandingkan dengan perekonomian nasional karena mobilitas faktor-faktor produksi dan kegiatan perdagangan di antara daerah tersebut dengan daerah lainnya di negara tersebut adalah lebih bebas dari yang terjadi di antara berbagai negara.

Modal dan tenaga kerja dapat berpindah dengan sangat mudah di antara satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi di antara berbagai negara terdapat beberapa hambatan yang diciptakan negara-negara tersebut yang membatasi kebebasan modal dan tenaga kerja untuk bergerak dari satu negara ke negara lainnya.

Hal yang sama terjadi dalam perdagangan, yaitu di antara berbagai daerah pada umumnya prosedurnya lebih mudah dan pembatasan pada

daerah tersebut sangat minimal, sedangkan di antara berbagai negara bukan saja prosedurnya yang lebih kompleks tetapi juga terdapat berbagai macam hambatan dalam bentuk tarif dan bea masuk atau *quota import*, Sukirno (1976:113).

a. Manfaat perencanaan pembangunan ekonomi daerah

Peranan perencanaan pembangunan dalam perekonomian daerah menurut, Sukirno (1976:116) adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu pemerintah pusat dan pada waktu yang sama mengemukakan pendapatnya dalam meneliti proyek-proyek yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.
- 2) Menciptakan desentralisasi yang efektif dan selanjutnya menciptakan administrasi yang lebih efisien.
- 3) Memberikan pengarahan kepada sektor swasta sehingga kegiatan investasi mereka dapat dilaksanakan secara efisien dan memberikan sumbangan yang maksimal terhadap pembangunan ekonomi.

b. Peranan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah

Menurut Irawan (1997:98), Peranan pemerintah dalam inisiatif dan memajukan perekonomian serta hubungan antara sektor pemerintahan dengan swasta, adalah tergantung pada lingkungan sosial, tingkat perkembangan ekonomi, keadaan politik, tersedianya *private* manajemen, pengalaman dalam perusahaan negara dan efisiensi administrasi pembangunan.

Kebijaksanaan yang dirumuskan Pemerintah Daerah haruslah diarahkan kepada peningkatan pembentukan modal dari masa ke masa karena langkah ini akan dapat mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan modal memegang dua macam fungsi dalam pembangunan ekonomi, untuk menciptakan permintaan bagi produksi barang dan jasa-jasa yang dihasilkan masyarakat dan untuk menambah kapasitas produksi suatu daerah, Sukirno (1976:146).

Pembangunan ekonomi seharusnya dirancang sedemikian rupa sehingga menjamin penggunaan faktor-faktor produksi yang ada sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena itu pemilihan kebijaksanaan pembangunan harus ditentukan atas dasar sifat dan tujuan yang berbeda-beda dalam mencapai peningkatan pendapatan perkapita dan rendahnya tingkat pengangguran.

3. Perencanaan tenaga kerja

Pembangunan ekonomi banyak dipengaruhi oleh hubungan antara manusia dengan faktor-faktor produksi yang lain dan juga sifat-sifat manusia itu sendiri. Dari segi penduduk sebagai faktor produksi, maka tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja yang dapat dianggap sebagai faktor produksi, Irawan (1997:67).

Rencana pembangunan menurut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di seluruh sektor atau sub sektor ekonomi. Setiap rencana pembangunan sekaligus mencerminkan kebutuhan tenaga kerja terdidik. Keberhasilan suatu rencana pembangunan sangat tergantung pada kemampuan menyediakan tenaga-tenaga yang melaksanakannya. Rencana tenaga kerja, di satu pihak memuat perkiraan kebutuhan tenaga untuk beberapa tahun ke depan sesuai dengan perkembangan ekonomi atau rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Di pihak lain rencana tenaga kerja memuat cara dan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

Dasar perkiraan kesempatan kerja adalah rencana investasi atau target hasil yang direncanakan, atau secara umum rencana pembangunan. Tiap kegiatan mempunyai daya serap yang berbeda akan tenaga kerja, baik dalam kuantitas, maupun dalam kualitas. Daya serap tersebut berbeda secara sektoral dan menurut penggunaan teknologi. Sektor kegiatan yang dibangun dengan cara padat karya pada dasarnya dapat menciptakan kesempatan kerja yang relatif besar dan tidak terlalu terikat kepada persyaratan ketrampilan yang tinggi. Sebaliknya sektor atau sub sektor yang dibangun dengan padat modal menimbulkan kesempatan kerja yang relatif sedikit, akan tetapi dengan tenaga berketerampilan yang cukup tinggi.

Perkiraan daya serap tenaga kerja tiap sektor dan sub sektor ekonomi serta persyaratan kualifikasi yang diperlukan sangat penting dalam memerkirakan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan keterangan-keterangan mengenai (Simanjuntak, 1985:128) :

- a. Satuan pertambahan investasi untuk penciptaan satu kesempatan kerja (*incremental capital employment ratio*) pada waktu yang lalu.
- b. Koefisien kebutuhan tenaga kerja untuk satu satuan hasil (*labor requirment per unit output*) di masa yang lampau.
- c. Perkiraan *incremental capital employment ratio* dan *labor requirment per unit output* selama periode perencanaan
- d. Rencana investasi dan target output selama periode perencanaan.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Made Antara (2007) dengan penelitiannya yang berjudul *Analisis Kebutuhan Investasi Sektor Basis Dan Non Basis Dalam Perekonomian Regional Bali*, Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa terindikasi 4 sektor basis yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Dalam menentukan pertumbuhan ekonomi digunakan dua skenario yaitu berdasarkan trend linear dan target optimistik dimana semakin tinggi pertumbuhan maka kebutuhan investasi semakin besar.

Nuhfil Hanani dan Iwan Nugroho (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu pendekatan input-output*, disimpulkan bahwa Nilai ICOR sub sektor tanaman pangan berkisar dari 1.309 hingga 0.57; sub sektor peternakan berkisar dari 1.338 hingga 1.149; sub sektor perkebunan berkisar dari 1.59 hingga 1.405; dan sub sektor perikanan berkisar 4.798 hingga 3.98. Proyeksi kebutuhan

investasi sektor pertanian selama 1999 hingga 2004 berkisar dari 2127 hingga 2386 triliun rupiah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ICOR maka kebutuhan investasi semakin besar.

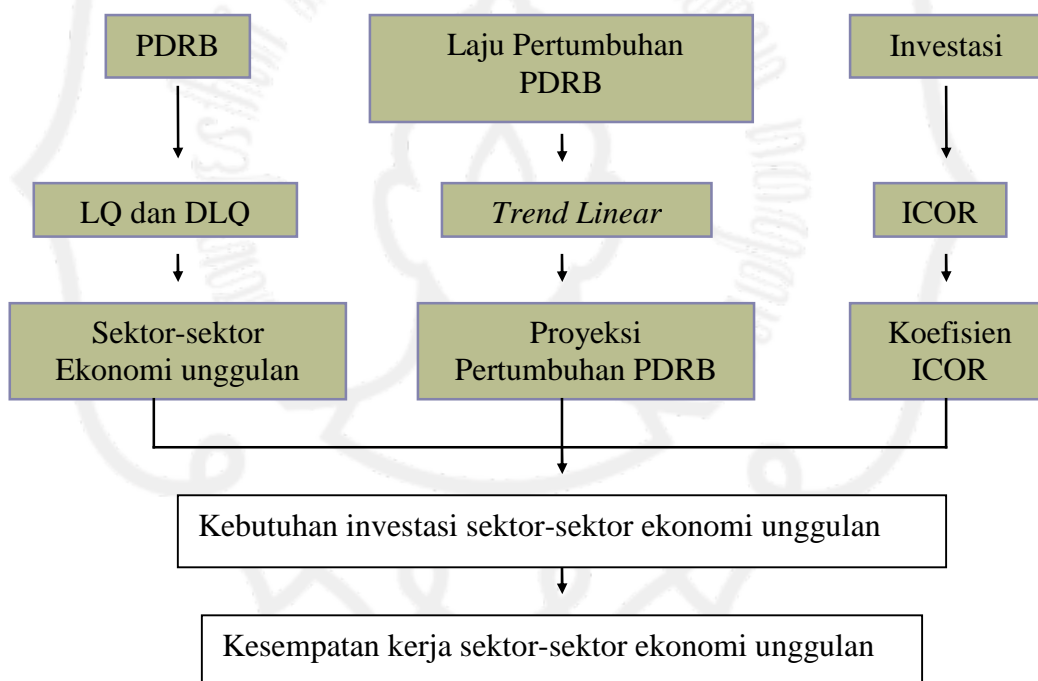
Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Nugroho (2007) dengan penelitiannya yang berjudul *Pengembangan Dan Kebutuhan Investasi Sektor Air Bersih Di Propinsi Jawa Timur*, Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa peningkatan investasi dari 1.286 triliun menjadi 1.582 triliun meningkatkan kapasitas produksi dari 31.0 menjadi 43.7 m³. Partisipasi swasta dalam sektor Air Bersih adalah kunci penting untuk memperbaiki manajemen dan efisiensi, menurunkan tingkat kebocoran, meningkatkan pelayanan, menarik investasi dan untuk kepentingan pembangunan sektor Air Bersih dalam jangka panjang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iwan Nugroho dan Nuhfil Hanani (2007) yang berjudul *Studi Investasi untuk Pengembangan Komoditi Pertanian di Propinsi Lampung: Pendekatan input-output*, disimpulkan bahwa ICOR subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan di Lampung masing-masing sebesar 0.66, 0.25, 3.04, dan 0.16. Nilai ICOR tanaman pangan dan perkebunan kurang dari satu menunjukkan bahwa sektor tersebut relatif efisien sehingga memungkinkan diusahakan oleh sebagian besar petani. ICOR rendah menunjukkan bahwa untuk menghasilkan output membutuhkan investasi yang relatif sedikit.

Putu Ayu (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan*

Pertumbuhan Berbasis Ekspor disimpulkan bahwa Sektor basis kesempatan kerja di Kabupaten Bangli pada tahun awal penelitian adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sepuluh tahun kemudian sector basis bertambah menjadi tiga sektor yaitu masuknya sektor pertambangan dan penggalian. Sektor-sektor ini adalah sector yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari cukup sehingga dapat menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan lokal (Kabupaten Bangli) dan juga untuk daerah lain.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Ketersediaan sumberdaya dalam suatu daerah dapat dijadikan sebagai nilai PDRB yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan sektor ekonomi

unggulan suatu daerah. Adanya potensi tersebut dapat dikembangkan melalui investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output, juga akan meningkatkan permintaan input, sehingga nantinya akan meningkatkan kesempatan kerja.

F. Hipotesis

1. Diduga terdapat sektor unggulan dalam sektor-sektor ekonomi Kota Surakarta.
2. Diduga semakin besar nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka kebutuhan investasi akan semakin meningkat.
3. Diduga dengan bertambahnya kebutuhan investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai analisis kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta yang dapat digunakan sebagai proyeksi kesempatan kerja di Kota Surakarta .

B. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diambil dari lembaga/instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, Bank Indonesia Kota Surakarta serta studi pustaka lainnya.

C. Definisi operasional variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin besar PDRB suatu wilayah maka semakin tinggi tingkat kemajuan pembangunan di wilayah tersebut. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Untuk mengetahui kenaikan PDRB yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan terlebih dahulu. PDRB yang didalamnya masih ada unsur inflasinya dinamakan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan PDRB dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan PDRB atas dasar harga konstan. Untuk mengetahui daya beli masyarakat meningkat atau tidak, PDRB harus dibandingkan dalam nilai konstan. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu, Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi, karena harga dianggap konstan (Tarigan, 2004:21).

2. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak. Laju pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator perkembangan PDRB dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam persen per tahun. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pembangunan daerah dilihat dari besarnya pertumbuhan PDRB setiap tahunnya.

3. Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal dalam suatu produksi untuk meningkatkan output produksi. Investasi sektor ekonomi yang dimaksudkan

dalam variabel ini adalah suatu bentuk investasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam sektor ekonomi dan pemerintah Kota Surakarta. Di mana modal/dana yang digunakan oleh masyarakat dalam sektor ekonomi untuk melakukan investasi berasal dari pinjaman perbankan baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing meliputi pinjaman yang digunakan sebagai investasi dan modal kerja. Data yang diperoleh bersumber dari Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia kantor wilayah Semarang. Sedangkan investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyertaan modal dan belanja modal. Data diperoleh bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Penjelasan dari investasi sektor ekonomi adalah sebagai berikut :

a. Pinjaman investasi

Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan pendirian usaha baru.

b. Pinjaman modal kerja

Pinjaman modal kerja adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan.

c. Penyertaan modal

Halim (2008:4) , menyatakan dalam pengeluaran pembiayaan yang mencakup item-item untuk menyalurkan kelebihan dana anggaran (APBD), salah satunya adalah untuk investasi dalam arti penyertaan modal.

d. Belanja modal

Dalam peraturan perundangan PP 58/2005 dan Permendagri 13/2006, investasi diartikan atau didefinisikan sebagai penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam hal ini ditekankan pada penggunaan aset., diperoleh melalui proses pengeluaran dana yang disebut belanja modal.

4. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), dengan demikian kesempatan kerja adalah termasuk lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong (Yudo,Endang, 1983:20).

D. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisa kuantitatif melalui pendekatan basis ekonomi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Location quotient (LQ)*

Aktivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor yakni aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Aktivitas basis memiliki peranan penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah tehnik yang digunakan adalah *location quotient* (LQ). LQ digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau unggulan (*leading sector*) dengan mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional.

Location quotient merupakan rasio antara jumlah tenaga kerja pada sektor tertentu (Industri) atau PDRB terhadap total tenaga kerja sektor tertentu atau total nilai PDRB disuatu daerah (kabupaten) dibandingkan dengan rasio tenaga kerja atau PDRB dan sektor yang sama di Propinsi (Imelia, 2006:24) :

Formula Matematis

$$LQ = \frac{V_i(s) / V(s)}{V_i(r) / V(r)}$$

Dimana :

$V_i(s)$ = Jumlah PDRB suatu sektor di wilayah studi

$V(s)$ = Jumlah PDRB total di wilayah studi

$V_{i r}$ = Jumlah PDRB suatu sektor di wilayah referensi

V_r = Jumlah PDRB total di wilayah referensi

Interprestasi :

- Apabila nilai $LQ > 1$: maka peranan sektor tersebut di wilayah studi lebih menonjol dari pada sektor di wilayah referensi.
- Apabila nilai $LQ < 1$: maka peranan sektor tersebut di wilayah studi lebih kecil daripada peranan sektor tersebut di wilayah referensi.
- Apabila nilai $LQ = 1$: maka peranan sektor tersebut di wilayah studi maupun peranan sektor tersebut di wilayah referensi sama baiknya.

2. DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

Kegiatan perencanaan ekonomi untuk pengembangan sektor kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan proses identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa mendatang. Kedua, sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat ini belum mempunyai daya saing yang baik.

DLQ (*Dynamic Location Quotient*) digunakan untuk mengetahui proporsi antara laju pertumbuhan sektor terhadap laju pertumbuhan PDRB suatu daerah dengan laju pertumbuhan sektor terhadap PDRB daerah acuan (daerah yang lebih luas). DLQ mengintroduksi laju pertumbuhan dengan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun dasar (0) dan tahun akhir (t) Widodo (2006: 119).

$$DLQ = \left[\frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

g_{in} : Laju pertumbuhan sektor i di wilayah studi

g_n : Laju pertumbuhan semua sektor di wilayah studi

G_i : Laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi

G : laju pertumbuhan semua sektor di di wilayah referensi

Asumsi yang digunakan adalah :

- Jika $DLQ = 1$, berarti laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan di wilayah studi sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB di wilayah referensi.
- Jika $DLQ < 1$, berarti laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan di wilayah studi lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB di wilayah referensi.
- Jika $DLQ > 1$, berarti laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan di wilayah studi lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB di wilayah referensi.

3. *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)*

Dalam ICOR Kabupaten Bandung (2008:7) dijelaskan bahwa *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan *capital* (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Widodo (2006: 153) mendefinisikan ICOR sebagai suatu hubungan antara investasi yang ditanamkan dan pendapatan tahunan yang dihasilkan dari investasi tersebut. Pentingnya ICOR ini akan tampak ketika diuji konsistensinya antara target pertumbuhan ekonomi dengan tambahan modal yang mungkin akan terkumpul dari investasi yang sedang berjalan. Dengan demikian, ICOR dapat dipakai untuk menentukan laju pertumbuhan suatu perekonomian.

Konsep ICOR bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan kenaikan/ penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan capital. ICOR bisa diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ICOR} = \Delta K / \Delta Y \dots \dots \dots (1)$$

dimana :

ΔK = Perubahan kapital

ΔY = Perubahan output

Dari rumus (1) didapatkan pengertian bahwa ICOR merupakan statistik yang menunjukkan kebutuhan perubahan stok kapital untuk menaikkan satu unit output.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah sehingga rumusan ICOR dimodifikasi menjadi:

$$\text{ICOR} = I / \Delta Y \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

I = Investasi

ΔY = Perubahan output

Metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR) digunakan menentukan kebutuhan tambahan kapital atau investasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Surakarta. Formula yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi, mengacu pada Kadariah (1981: 27) dan Arsyad (1999: 233-251) dalam (Made Antara) , yaitu:

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K_t}{\Delta Y_t}$$

$$\Delta K_t = I_t = \text{ICOR} \times \Delta Y_t$$

$$\Delta Y_t = g_t \times Y_{t-1}$$

$$g_t = \frac{\Delta Y_t}{Y_{t-1}}$$

$$\text{Jadi: } \Delta K_t = I_t = \text{ICOR} \times g_t \times Y_{t-1}$$

dimana:

ICOR = Rasio pertambahan modal dan output

$\Delta K_t = I_t$ = Tambahan kapital/modal untuk investasi sektor ke-i tahun ke-t,

ΔY_t = Tambahan nilai tambah atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t akibat adanya pertumbuhan ekonomi tahun ke-t,

Y_{t-1} = Nilai tambah bruto atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t-1,

g_t = Pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t atau target pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t.

4. Trend Linear

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula.

Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan, dimana dapat digunakan untuk pembuatan proyeksi atau perkiraan kebutuhan investasi tahunan dan target pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam membuat proyeksi investasi harus memerhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor periode 2008-2015 sebagai jangka waktu perencanaan menggunakan *Trend Linear* dengan metode kuadrat terkecil (*least square*) untuk memperoleh regresi dengan jumlah penyimpangan terkecil, pada Widodo (2006: 141), dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bT$$

$$b = \frac{\sum yt}{\sum t^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{T}$$

di mana :

Y = pertumbuhan ekonomi periode 2008-2015

T = tahun 2003-2015

a = intersep

b = koefisien regresi atau pengaruh variabel T terhadap Y

5. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja

Menurut Yudo,Endang (1983:55), dalam proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara sektoral data masa lalu tiap sektor perlu dikumpulkan dan kemudian ditentukan nilai *incremental labor productivity*, selanjutnya dengan menggunakan target investasi atau produksi (*output*) dari rencana pembangunan yang ada dapat diperkirakan kesempatan kerja yang tersedia.

Perkiraan kebutuhan tenaga kerja dari target investasi dilakukan dengan memerkirakan kebutuhan tenaga kerja dari rencana investasi. Hal ini bertujuan untuk memerkirakan dan merencanakan kesempatan kerja yang dibutuhkan akibat adanya kegiatan investasi di masa datang.

$$E_j = I_j : q$$

$$q = \frac{I_j}{E_j}$$

$$E_{t+1,j} = \frac{I_{t+1,j}}{q}$$

di mana

E = kesempatan kerja

I = tambahan kapital / Investasi

$E_{t+1,j}$ = proyeksi kebutuhan kesempatan kerja

$I_{t+1,j}$ = proyeksi kebutuhan investasi

j = notasi j untuk sektor ke 1 s/d n

q = kapital *labor ratio*

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Keadaan Geografis Kota Surakarta

Kota Surakarta yang dikenal sebagai Kota Solo, merupakan dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air laut. Kota Surakarta terletak $110^{\circ}45'15''$ dan $110^{\circ}45'35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}36'$ dan $7^{\circ}56'$ Lintang Selatan.

Kota Surakarta dibatasi oleh :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai $44,04 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Sebagian besar lahan dipakai sebagai tempat pemukiman sebesar 62%. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi berkisar antara 20% dari luas lahan yang ada.

**Tabel 4.1 Persentase Luas Penggunaan Tanah di Kota Surakarta
berdasar penggunaannya tahun 2007**

No	Penggunaan Tanah	Luas Tanah (ha)	Persentase (%)
1	Perumahan/Pemukiman	2730,57	62,00
2	Jasa	427,13	9,70
3	Perusahaan	287,48	6,53
4	Industri	101,42	2,30
5	Tanah Kosong	53,38	1,21
6	Tegalan	85,72	1,95
7	Sawah	149,32	3,39
8	Kuburan	72,86	1,65
9	Lapangan Olahraga	65,14	1,48
10	Taman Kota	31,6	0,72
11	Lain-lain	399,44	9,07
Jumlah		4404,06	100

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Berdasarkan data Surakarta dalam angka tahun 2007, penggunaan lahan terbesar di Kota Surakarta secara umum adalah penggunaan lahan untuk perumahan. Hal ini berkaitan dengan tingginya kepadatan penduduk Kota Surakarta. Penggunaan lahan untuk pemukiman mencapai 2.730,57 ha pada tahun 2007. Pada urutan kedua adalah penggunaan lahan untuk kegiatan jasa yang mencapai 427,13 ha. Penggunaan lahan lainnya adalah penggunaan lahan untuk perusahaan sebesar 287,48 ha, penggunaan lahan untuk industri sebesar 101,42 ha, lahan kosong sebesar 53,38 ha, tegalan sebesar 85,72 ha, sawah sebesar 149,32 ha, kuburan sebesar 72,86 ha, lapangan olahraga sebesar 65,14 ha, taman kota sebesar 31,6 ha, dan penggunaan lahan lainnya sebesar 399,44 ha.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai suatu kota, berdasarkan data penggunaan lahan yang ada, Surakarta lebih banyak memiliki penggunaan

lahan untuk kegiatan produktif non pertanian. Jumlah lahan untuk pertanian hanya sedikit, yang jumlahnya hanya seimbang dengan jumlah penggunaan lahan untuk perusahaan. Penggunaan lahan paling besar terlihat untuk kegiatan produksi jasa dan servis, kegiatan industri manufaktur, dan penggunaan lainnya seperti untuk kegiatan perdagangan maupun penggunaan lahan untuk sarana dan prasarana kota seperti untuk terminal, kantor pemerintahan, perbankan, perguruan tinggi, dan kegiatan non pertanian lainnya.

2. Kependudukan

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007, jumlah penduduk kota Surakarta mencapai 515.372 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 91,42 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 92 penduduk laki-laki.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2003 – 2007

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Pertumbuhan (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2003	242.591	254.643	497.234	1,43
2004	249.278	261.433	510.711	2,71
2005	250.868	283.672	534.540	4,67
2006	254.259	258.639	512.898	-4,05
2007	246.132	269.240	515.372	1,47

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2006 dengan pertumbuhan negatif (-4,05%) dan pada tahun 2007 kembali meningkat sebesar 1,47%, dimana dari jumlah penduduk pada tahun 2006 yang mencapai 512.898 jiwa meningkat menjadi 515.372 jiwa pada tahun 2007.

Tabel 4.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2003-2007

Tahun	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kepadatan (jiwa/ km ²)
2003	44,04	497.234	11.290
2004	44,04	510.711	11.520
2005	44,04	534.540	12.137
2006	44,04	512.898	11.646
2007	44,04	515.372	12.827

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2007 mencapai 12.827 jiwa/km². Tahun 2007 tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di kecamatan serengan yang mencapai angka 19.884. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan berdampak pada masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan juga tingkat kriminalitas.

Komposisi penduduk Kota Surakarta jika dilihat berdasarkan kelompok usianya, pada tahun 2007 yang paling banyak adalah penduduk berusia 20-24 tahun dengan jumlah 48.972 orang, atau 9,5% dari total penduduk. Sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk yang berusia 60-64 tahun dengan jumlah 13.780 orang atau 2,67% dari total penduduk. Jika dilihat secara umum, penduduk Kota Surakarta sebagian besar usia

produktif (20-60 tahun) sehingga kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi Kota Surakarta karena pada usia tersebut SDM berkemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Tabel 4.4 Penduduk Kota Surakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2007 (berdasarkan hasil SUSENAS 2007)

Umur	Jenis Kelamin				Jumlah	(%)
	Laki-laki	(%)	Perempuan	(%)		
0-4	19.080	7,75	17.384	6,46	36.464	7,08
5-9	19.716	8,01	20.776	7,72	40.492	7,86
10-14	22.260	9,04	21.836	8,11	44.096	8,56
15-19	21.412	8,70	25.016	9,29	46.428	9,01
20-24	24.380	9,91	24.592	9,13	48.972	9,50
25-29	19.928	8,10	22.048	8,19	41.976	8,14
30-34	23.956	9,73	18.868	7,01	42.824	8,31
35-39	17.172	6,98	21.836	8,11	39.008	7,57
40-44	16.536	6,72	21.412	7,95	37.948	7,36
45-49	19.928	8,10	20.988	7,80	40.916	7,94
50-54	15.264	6,20	13.780	5,12	29.044	5,64
55-59	8.692	3,53	10.388	3,86	19.080	3,70
60-64	4.028	1,64	9.752	3,62	13.780	2,67
65+	13.780	5,60	20.564	7,64	34.344	6,66
Jumlah	246.132	100	269.240	100	515.372	100

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Dilihat dari kelompok usia, terdapat sebesar 69,85 persen penduduk atau 359.976 orang adalah usia produktif (15-64 tahun) dan usia non produktifnya (0-14 dan 65+ tahun) adalah 30,15 persen. Angka ketergantungannya, yaitu usia non (belum/tidak) produktif dibagi usia produktif adalah 43,17 persen. Angka ini berarti 43,17 persen penduduk akan tergantung pada usia yang produktif. Ciri khas suatu perkotaan

terpenuhi dengan adanya kepadatan penduduk yang tinggi (diatas 10.000 jiwa/Km²) dan ketergantungan yang rendah (dibawah 50 persen).

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika pembangunan yang dilakukan tidak dapat mengandalkan sumber daya alam yang keberadaannya terbatas maka peningkatan sumber daya manusia yang hasilnya merupakan modal untuk penggerak pembangunan.

Tabel 4.5 Penduduk 5 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2003-2007

Tahun	Pendidikan						
	Tdk Sklh	Blm Tmt SD	Tdk Tmt SD	Tmt SD	Tmt SMP	Tmt SMA	Tmt Akdm/ PT
2003	24.048	71.195	47.657	108.938	97.444	93.270	29.505
2004	25.184	73.979	47.498	105.816	103.569	95.974	33.103
2005	25.658	67.858	42.924	99.859	103.037	101.018	33.156
2006	24.489	66.223	43.302	104.270	102.494	98.186	33.823
2007	12.468	49.199	28.018	77.029	77.830	83.364	30.090

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Tingkat pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor yang menunjang seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Penduduk Kota Surakarta pada tahun 2007 dengan tingkat pendidikan minimal SMA berjumlah 113.454 orang yang merupakan 22% dari total penduduk. Berdasarkan data tersebut, diharapkan banyak dari jumlah penduduk Kota Surakarta yang terserap dalam lapangan kerja sehingga mampu menekan angka pengangguran.

4. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja pada dasarnya adalah sekelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu mereka yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja lebih didominasi oleh mereka yang bekerja yaitu sebanyak 90,69 persen. Sedangkan yang tidak bekerja alias menganggur sebanyak 9,31 persen.

Tabel 4.6 Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Surakarta Tahun 2007

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja	149.035 (88,23%)	111.645 (94,19%)	260.680 (90,69%)
Pengangguran	19.886 (11,77%)	6.884 (5,81%)	26.770 (9,31%)
Angkatan Kerja	168.921 (100%)	118.529 (100%)	287.450 (100%)

Sumber : *Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta 2007*

Dari 260.680 orang penduduk Kota Surakarta yang bekerja, tercatat tenaga kerja perempuan sebanyak 42,83 persen sedangkan laki-laki mencapai 57,17 persen. Persentase tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bekerja sudah mulai mendekati kaum laki-laki. Yang berarti juga bahwa kesetaraan gender dalam bekerja sudah mulai terwujud.

Tabel 4.7 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin Di Kota Surakarta Tahun 2007

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1. Pertanian, Perkebunan	0,71	0,45	0,6
2. Pertambangan & Penggalian	0	0	0,00
3. Industri Pengolahan	21,23	23,83	22,34
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,19	0,18	0,19
5. Konstruksi	6,40	0,45	3,85
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	39,34	47,29	42,74
7. Angkutan, Pergudangan	10,08	2,36	6,77
8. Keuangan dan Asuransi	3,26	1,26	2,41
9. Jasa Kemasyarakatan	18,80	24,17	21,10
Jumlah	100	100	100

Sumber : Profil Ketenagakerjaan Kota Surakarta 2007

Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi merupakan sektor usaha yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu 42,74 persen diikuti sektor industri 23,34 persen dimana penyerapan tenaga kerjanya berimbang dengan sektor Jasa Kemasyarakatan sebanyak 21,10 persen.

Tabel 4.8 Banyaknya Penduduk menurut Menurut Mata Pencaharian di Kota Surakarta Tahun 2007

Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
Petani	450	0,11
Buruh Tani	438	0,11
Pengusaha	8752	2,18
Buruh Industri	74655	18,60
Buruh Bangunan	63114	15,72
Pedagang	32710	8,15
Angkutan	15347	3,82
PNS/TNI/POLRI	26445	6,59
Pensiunan	16974	4,23
Lain-lain	162526	40,49
Jumlah	401411	100

Sumber : Surakarta dalam Angka Tahun 2007

Sementara itu jika dilihat berdasarkan mata pencaharian penduduk pada tahun 2007, jumlah yang paling sedikit adalah penduduk bermata pencaharian sebagai petani baik itu pada pertanian milik sendiri maupun sebagai buruh tani, dengan total sebanyak 888 orang. Hal ini tentunya disebabkan karena sempitnya lahan pertanian di Kota Surakarta yang luasnya mencakup 235,04 Ha, atau 5,44 % dari luas wilayah seluruhnya. Sedangkan jumlah terbanyak adalah penduduk bermata pencaharian diluar bidang pertanian yang mencapai 400.523 orang.

5. Kondisi Ekonomi

Keberhasilan Kota Surakarta dalam mewujudkan kebijakan pro investasi ditandai dengan diraihnya penghargaan sebagai peringkat ketiga Kota Pro-investasi Tingkat Jawa Tengah dan peringkat duabelas se-

Indonesia. Selain itu, dalam Forum Bisnis Prasarana Jawa Tengah (*Central Java Infrastructure Business Forum*), Kota Surakarta berhasil menarik minat dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI) untuk pengembangan infrastruktur berupa penyediaan air bersih, pengembangan *Solo Techno Park*, Tower Telekomunikasi dan Hotel.

PDRB Kota Surakarta yang disajikan secara series memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas. Tentu saja ini akan bermanfaat untuk berbagai kepentingan seperti perencanaan, evaluasi maupun kajian suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar yang mana dalam perhitungan ini digunakan tahun dasar 2000. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Secara lebih jelas PDRB Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta Tahun 2003-2007 (Persen)

Lapangan Usaha	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Pertambangan Dan Penggalian	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Industri Pengolahan	28,63	28,10	26,42	25,11	24,34
Listrik, Gas Dan Air Bersih	2,63	2,70	2,59	2,69	2,69
Bangunan	12,80	12,68	12,89	13,07	13,38
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	22,67	22,96	23,82	24,35	24,78
Pengangkutan Dan Komunikasi	10,79	10,83	11,52	11,78	11,61
Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan	10,73	11,14	11,43	11,26	11,06
Jasa-Jasa	11,62	11,48	11,23	11,64	12,04
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2007

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta seperti pada tabel diatas dilihat dari kontribusi tiap sektornya, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, sektor industri pengolahan masih merupakan sektor andalan terbesar Kota Surakarta. Akan tetapi pada tahun 2007 sektor ini menduduki peringkat kedua dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta dengan persentase sebesar 24,34 persen. Adapun sektor andalan pada tahun 2007 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 24,78 persen. Sektor yang memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kota Surakarta terletak pada sektor primernya yakni pertambangan dan galian dengan kontribusi sebesar 0,04 persen serta sektor pertanian sebesar 0,06 persen.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Loqation Quotient*

Untuk melakukan analisis terhadap sektor basis di Kota Surakarta maka dilakukan perhitungan LQ (*location quotient*), yang perhitungannya mengacu pada rumus :

$$LQ = \frac{V_i(s) / V(s)}{V_i(r) / V_r}$$

Dimana : $V_i(s)$ = Jumlah PDRB suatu sektor Kota Surakarta

$V(s)$ = Jumlah PDRB total Kota Surakarta

$V_i(r)$ = Jumlah PDRB suatu sektor Provinsi Jawa Tengah

V_r = Jumlah PDRB total tingkat Provinsi Jawa Tengah

Perhitungan LQ dilakukan pada tahun 2003-2007, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10 Perhitungan *Location Quotient*

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rerata
		2003	2004	2005	2006	2007	
1.	Pertanian	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,004
2.	Pertambangan Dan Penggalian	0,050	0,048	0,046	0,039	0,038	0,044
3.	Industri Pengolahan	0,925	0,917	0,889	0,872	0,853	0,891
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	2,839	2,794	2,640	2,706	2,671	2,730
5.	Bangunan	2,237	2,091	2,122	2,115	2,158	2,145
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1,147	1,202	1,222	1,233	1,228	1,207
7.	Pengangkutan & Komunikasi	2,042	2,058	2,026	2,011	1,969	2,021
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	2,686	2,717	2,768	2,756	2,728	2,731
9.	Jasa-Jasa	1,202	1,182	1,185	1,174	1,165	1,182

Sumber : hasil pengolahan data dari lampiran 1 dan lampiran 2

Sebelum melakukan perhitungan kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta, terlebih dahulu dilakukan identifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Surakarta. Identifikasi penting dilakukan sebagai dasar perencanaan alokasi sumberdaya investasi, karena sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan yang akan mendatangkan tambahan pendapatan dari ekspor kelebihan produk yang dihasilkan oleh sektor basis tersebut setelah terpenuhi kebutuhannya sendiri.

Identifikasi dilakukan dengan menggunakan formula *location quotient* (LQ), yakni membandingkan secara relatif nilai tambah suatu sektor (PDRB sektor) terhadap nilai tambah total (PDRB Kota Surakarta) dengan nilai tambah sektor yang sama (PDRB sektor Jawa Tengah) terhadap nilai tambah total (PDRB Jawa Tengah).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa untuk Kota Surakarta, sektor basis dengan nilai LQ yang lebih dari 1 yang merupakan sektor basis terdapat pada sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel & Restoran, Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan dan Jasa-Jasa. Sedangkan 3 sektor yang lain adalah sektor non basis yang ditunjukkan oleh LQ kurang dari 1 terdapat pada sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, dan Industri Pengolahan.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memiliki nilai LQ tertinggi dengan nilai sebesar 2,731. Keunggulan yang dimiliki sektor

tersebut disebabkan terdapat 41 unit Bank di Kota Surakarta yang jumlahnya terbanyak se-Jawa Tengah berdasarkan pada Angka-angka sektor riil Bank Indonesia. Sehingga Kota Surakarta memiliki keunggulan dalam pelayanan jasa yang dapat diberikan kepada daerah lain.

Sedangkan nilai LQ terendah terdapat pada Sektor pertanian sebesar 0,044. Hal ini dipengaruhi oleh sedikitnya penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani yang disebabkan sempitnya lahan pertanian di Kota Surakarta yang luasnya mencakup 5,44% dari luas wilayah seluruhnya.

Secara umum dapat pula diartikan bahwa sektor-sektor basis, tidak hanya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga mampu memasok daerah lain. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Sedangkan sektor-sektor non basis berarti Kota Surakarta mendatangkan produk untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kota Surakarta dari daerah lain.

2. Analisis DLQ (*Dynamic Location Quotient*)

DLQ (*Dynamic Location Quotient*) digunakan untuk mengetahui proporsi antara laju pertumbuhan sektor terhadap laju pertumbuhan PDRB Kota Surakarta dengan laju pertumbuhan sektor terhadap PDRB Jawa Tengah. Dimana perhitungannya menggunakan rumus:

$$DLQ = \left[\frac{(1 + g_{in}) / (1 + g_n)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

Dimana :

g_{in} : Laju pertumbuhan sektor i di Kota Surakarta

g_n : Laju pertumbuhan semua sektor di Kota Surakarta

G_i : Laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Jawa Tengah

G : laju pertumbuhan semua sektor di Provinsi Jawa Tengah

Perhitungan DLQ dilakukan pada tahun 2003-2007, dengan hasil sebagai berikut (hasil pengolahan disajikan pada lampiran 3) :

Tabel 4.11 Perhitungan *Dynamic Location Quotient*

No	Lapangan Usaha	DLQ
1.	Pertanian	-0,001
2.	Pertambangan & Penggalian	0,003
3.	Industri Pengolahan	0,235
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,336
5.	Bangunan	0,259
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	2,708
7.	Pengangkutan & Komunikasi	0,421
8.	Kuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,278
9.	Jasa-Jasa	0,192

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa untuk Kota Surakarta, nilai DLQ yang lebih dari 1 terdapat pada sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan berarti laju pertumbuhan sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan terhadap laju pertumbuhan Kota Surakarta lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang cepat ditunjukkan dengan nilai DLQ sebesar 2,708 dikarenakan Kota Surakarta merupakan kota perdagangan dan tidak terlepas dari sarana penunjangnya. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan adanya *event* budaya berpengaruh terhadap perkembangan hotel dan restoran.

Pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan dengan nilai DLQ sebesar 1,278 ditunjang dengan adanya peningkatan tabungan masyarakat dari Rp 2,418 trilyun pada tahun 2003 menjadi Rp 3,868 trilyun pada tahun 2007, dimana jika dengan dibandingkan dengan Solo Raya berdasarkan Indikator ekonomi laju pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan lebih cepat daripada daerah lain.

Sedangkan sektor-sektor yang memiliki nilai DLQ kurang dari 1 antara lain sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan dan Komunikasi, dan Jasa-Jasa. Berarti laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan Kota Surakarta lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Jawa Tengah.

Nilai terendah DLQ terdapat pada Sektor Pertanian sebesar -0,0001 berarti bahwa sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh industri manufaktur dan pariwisata berkembang pesat sehingga banyak terjadi perubahan peruntukan lahan untuk kegiatan

industri dan perumahan penduduk. Sehingga produktivitas pertanian menurun akibat dari lahan pertanian semakin menurun.

Tabel 4.12 Klasifikasi Sektoral Atas Dasar Analisis Komparatif

Kriteria	DLQ<1	DLQ>1
LQ < 1	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Pertambangan & Penggalian - Industri Pengolahan 	
LQ > 1	<ul style="list-style-type: none"> - Listrik, Gas & Air Bersih - Bangunan - Pengangkutan & Komunikasi - Jasa-Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan, Hotel& Restoran - Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

Sumber : data diolah

Dari Tabel 4.12 terlihat bahwa sektor Perdagangan, Hotel& Restoran dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan merupakan sektor unggulan untuk Kota Surakarta dan masih berpotensi untuk unggul di masa mendatang karena memiliki nilai $LQ > 1$ dan $DLQ > 1$. Untuk sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Bangunan, Pengangkutan & Komunikasi, dan Jasa-Jasa adalah sektor unggulan yang tidak berpotensi unggul lagi di Kota Surakarta dengan nilai $LQ > 1$ namun $DLQ < 1$. Yang terakhir, Pertanian, Pertambangan & Penggalian dan Industri Pengolahan adalah sektor-sektor yang belum unggul dan sekaligus belum berpotensi unggul juga di Kota Surakarta dengan nilai $LQ < 1$ dan $DLQ < 1$.

3. Analisis *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)*

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan capital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output.

a. Perhitungan Koefisien ICOR

Untuk menghitung koefisien ICOR maka harus diketahui besarnya investasi dan besarnya pendapatan (PDRB) yang diperoleh dari hasil penanaman modal. Adapun investasi yang ditanamkan di sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dan Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan Kota Surakarta yaitu modal/dana yang digunakan oleh masyarakat dalam sektor ekonomi untuk melakukan investasi berasal dari pinjaman perbankan berupa pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja serta investasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa penyertaan modal dan belanja modal, sedangkan output yang dihasilkan dari investasi tersebut adalah output menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. ICOR diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{ICOR} = I / \Delta Y$$

dimana :

I = Investasi

ΔY = Perubahan output

Perhitungan ICOR dilakukan pada tahun 2004-2007, dengan hasil sebagai berikut (hasil pengolahan disajikan pada lampiran 5) :

Tabel 4.13 Perhitungan *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)*

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	Koefisien ICOR
1.	Perdagangan,Hotel& Restoran	1,08
2.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,43

Sumber : data diolah

Pada tabel 4.13 diketahui bahwa nilai ICOR sektor Perdagangan,Hotel& Restoran sebesar 1,08 yang berarti untuk menghasilkan output sebesar 1 rupiah maka dibutuhkan modal sebesar 1,08 rupiah. Sedangkan pada sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan nilai ICOR sebesar 0,43 berarti bahwa untuk menghasilkan output sebesar 1 rupiah maka dibutuhkan modal sebesar 0,43 rupiah. Semakin tinggi nilai ICOR maka semakin banyak jumlah investasi yang diperlukan, dan semakin rendah nilai ICOR maka semakin kecil investasi yang perlu ditanamkan dalam perekonomian Kota Surakarta.

b. *Trend Linear*

Model *trend linear* digunakan untuk melakukan proyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor periode 2008-2015. Dimana perhitungannya menggunakan rumus:

$$Y = a + bT$$

$$b = \frac{\sum yt}{\sum t^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{T}$$

di mana :

Y = pertumbuhan ekonomi periode 2008-2015

T = tahun 2003-2015

a = intersep

b = koefisien regresi atau pengaruh variabel T terhadap Y

Perhitungan *trend linear* dilakukan pada tahun 2008-2015, dengan hasil sebagai berikut (perhitungan selengkapnya pada lampiran 4) :

Tabel 4.14 Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (persen)

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,69	6,56	6,44	6,31	6,18	6,06	5,93	5,81
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,08	7,55	8,02	8,49	8,96	9,43	9,90	10,37

Sumber: data diolah

Tabel 4.15 Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp)

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2008	2009	2010	2011
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	1201810,12	1280672,9	1363097	1449108,43
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	455734,73	490151,82	529466,9	574418,64

Sumber: data diolah

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	1538721,29	1631937	1728744	1829114,4
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	625880,8	684888,8	752672,3	830694,3

Sumber: data diolah

Tabel 4.16 Proyeksi Pertumbuhan Nilai Tambah Bruto Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp)

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2008	2009	2010	2011
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	75338,43	78862,78	82424,11	86011,42
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	30144,55	34417,09	39315,08	44951,74

Sumber : data diolah

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	89612,87	93215,74	96806,5	100370,85
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	51462,17	59008,04	67783,45	78022,01

Sumber : data diolah

Dari target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta berdasarkan *trend linear* akan digunakan untuk melakukan proyeksi nilai tambah bruto dan proyeksi pertumbuhan nilai tambah bruto maka akan diperoleh hasil kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta seperti disajikan pada tabel 4.17.

c. Proyeksi Kebutuhan Investasi

Metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR) digunakan menentukan kebutuhan tambahan kapital atau investasi sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kota Surakarta. Formula yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi, mengacu pada Kadariah (1981: 27) dan Arsyad (1999: 233-251) dalam (Made Antara), yaitu:

$$ICOR = \Delta K_t / \Delta Y_t$$

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times \Delta Y_t$$

$$\Delta Y_t = g_t \times Y_{t-1}$$

$$gt = \Delta Y_t / Y_{t-1}$$

$$\text{Jadi: } \Delta K_t = I_t = ICOR \times gt \times Y_{t-1}$$

dimana:

ICOR = Rasio penambahan modal dan output

$\Delta K_t = I_t$ = Tambahan kapital/modal untuk investasi sektor ke-i tahun ke-t.

ΔY_t = Tambahan nilai tambah atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t akibat adanya pertumbuhan ekonomi tahun ke-t.

Y_{t-1} = Nilai tambah bruto atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t-1.

gt = Pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t atau target pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t (Berdasarkan perhitungan dengan metode *trend linear*).

Tabel 4.17 Kebutuhan Investasi Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan Kota Surakarta Tahun 2008-2015 (Juta Rp)

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2008	2009	2010	2011
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	81307,19	85110,76	88954,24	92825,76
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	13089,38	14944,6	17071,41	19518,96

Sumber: data diolah

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	96712,54	100600,8	104476,1	108322,8
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	22345,92	25622,49	29432,96	33878,75

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta diperoleh Kebutuhan investasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran periode 2008-2015 berturut-turut Rp 81307,19 juta (2008), Rp 85110,76 juta (2009), Rp 88954,24 juta (2010), Rp 92825,76 juta (2011), Rp 96712,54 juta (2012), Rp 100600,8 juta (2013), Rp 104476,1 juta (2014), Rp 108322,8 juta (2015), atau kebutuhan total investasi selama delapan tahun Rp 758310,3 juta atau Rp 758,310 milyar.

Kebutuhan investasi sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan periode 2008-2012 berturut-turut Rp 13089,38 juta (2008), Rp 14944,6 juta (2009), Rp 17071,41 juta (2010), Rp 19518,96 juta (2011), Rp 22345,92 juta (2012), Rp 25622,49 juta (2013), Rp 29432,96 juta (2014), Rp 33878,75 juta (2015) atau kebutuhan total investasi selama delapan tahun Rp 175904,5 juta atau Rp 175,904 milyar.

Kebutuhan sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pada pemerintah investasi berupa belanja modal dan penyertaan modal sedangkan pada pihak swasta melalui pinjaman perbankan baik dalam bentuk rupiah maupun

valuta asing meliputi pinjaman yang digunakan sebagai investasi dan modal kerja.

4. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja

Untuk melakukan proyeksi kebutuhan tenaga kerja secara sektoral dapat menggunakan target investasi atau produksi (*output*) dari rencana pembangunan yang ada dapat diperkirakan kesempatan kerja yang tersedia, yang perhitungannya mengacu pada rumus :

$$E_j = I_j : q$$

$$q = \frac{I_j}{E_j}$$

$$E_{t+1,j} = \frac{I_{t+1,j}}{q}$$

di mana

E = kesempatan kerja

I = tambahan kapital / Investasi

$E_{t+1,j}$ = proyeksi kebutuhan kesempatan kerja

$I_{t+1,j}$ = proyeksi kebutuhan investasi

j = notasi j untuk sektor ke 1 s/d n

q = kapital *labor ratio*

Berdasarkan tabel 4.18 Jumlah Penduduk bekerja di Kota Surakarta pada tahun 2007 mencapai 260.680, atau sebesar 50,58% dari seluruh penduduk Kota Surakarta.

Tabel 4.18 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2007

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1. Pertanian, Perikanan	1.055	505	1.560
2. Pertambangan	0	0	0
3. Industri Pengolahan	31.635	26.601	58.236
4. Listrik, Gas & Air Bersih	284	202	486
5. Konstruksi	9.536	506	10.042
6. Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	58.623	52.801	111.424
7. Angkutan, Pergudangan	15.017	2.638	17.655
8. Keuangan, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	4.865	1.409	6.274
9. Jasa Kemasyarakatan & Sosial	28.020	26.983	55.003
Jumlah	149.035	111.645	260.680

Sumber: Profil Ketenagakerjaan 2007

Pada tabel 4.19 Berdasarkan sektoral kebutuhan lapangan kerja yang ada, lowongan Sektor Keuangan, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan menempati urutan pertama dengan 1.268 orang diikuti oleh Sektor Perdagangan, Rumah makan dan Akomodasi dengan 1.167 orang serta Sektor Industri Pengolahan di urutan ketiga dengan 879 orang. Kota Surakarta sebagai kota dengan pembangunan yang pesat baik infrastruktur maupun mobilitas, perlu dilakukan pengembangan untuk sektor tersebut. Pengembangan yang dimaksud adalah membuka lapangan usaha yang lebih banyak lagi untuk warga Kota Surakarta, sehingga pertumbuhan ekonomi yang pesat akan diimbangi atau dinikmati oleh penduduk ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk Kota Surakarta.

**Tabel 4.19 Jumlah Lowongan Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha
Kota Surakarta Tahun 2007**

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
1. Pertanian, Perikanan	-	-	-
2. Pertambangan	-	-	-
3. Industri Pengolahan	91	788	879
4. Listrik, Gas & Air Bersih	-	-	-
5. Konstruksi	-	-	-
6. Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	523	644	1167
7. Angkutan, Pergudangan	-	-	-
8. Keuangan, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan	591	677	1268
9. Jasa Kemasyarakatan & Sosial	357	335	692
Jumlah	1.562	2.444	4.006

Sumber: Profil Ketenagakerjaan 2007

**Tabel 4.20 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kerja Sektor-Sektor
Ekonomi Unggulan Kota Surakarta Tahun 2008-2015**

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2008	2009	2010	2011
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	123576	129357	135199	141083
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9768	11153	12740	14566

Sumber : data diolah

No	Sektor-Sektor Ekonomi Unggulan	2012	2013	2014	2015
1	Perdagangan, Hotel & Restoran	146990	152900	158790	164636
2	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	16676	19121	21965	25283

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi kebutuhan tenaga kerja sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta pada Lampiran 6. diperoleh Kesempatan kerja berdasarkan target kebutuhan investasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran periode 2008-2012 berturut-turut 123576 (2008), 129357 (2009), 135199 (2010), 141083 (2011), 146990 (2012), 152900 (2013), 158790 (2014), 164636 (2015), total kesempatan kerja selama delapan tahun sebesar 41060 tenaga kerja.

Kesempatan kerja yang tercipta pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan periode 2008-2012 berturut-turut 9768 (2008), 11153 (2009), 12740 (2010), 14566 (2011), 16676 (2012), 19121 (2013), 21965 (2014), 25283 (2015), selama delapan tahun total kesempatan kerja sebesar 15514 tenaga kerja.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai analisa kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat sektor unggulan dalam sektor-sektor ekonomi Kota Surakarta yaitu Sektor Perdagangan, Hotel& Restoran dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan merupakan sektor unggulan untuk Kota Surakarta dan masih berpotensi untuk unggul sehingga merupakan sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Surakarta.
2. Dengan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang semakin besar maka kebutuhan investasi akan semakin meningkat. Pada sektor Perdagangan, Hotel& Restoran nilai tambah PDRB dari tahun 2008 sampai dengan 2015 meningkat dari Rp 75338,43 juta menjadi Rp 100370,85 juta maka kebutuhan investasi meningkat dari Rp 81307,19 juta menjadi Rp 108322,8 juta dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan nilai tambah PDRB dari tahun 2008 sampai dengan 2015 meningkat dari Rp 30144,55 juta menjadi Rp 78022,01 juta maka kebutuhan investasi meningkat dari Rp 13089,38 juta menjadi Rp 33878,75 juta.

3. Bertambahnya kebutuhan investasi maka akan meningkatkan kesempatan kerja Pada sektor Perdagangan, Hotel& Restoran kebutuhan investasi dari tahun 2008 sampai dengan 2015 meningkat dari Rp 81307,19 juta menjadi Rp 108322,8 juta maka kesempatan kerja yang terserap berdasarkan target investasi meningkat dari 123576 orang menjadi 164636 orang dan sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan kebutuhan investasi dari tahun 2008 sampai dengan 2015 meningkat dari Rp 13089,38 juta menjadi Rp 33878,75 juta maka kesempatan kerja yang terserap berdasarkan target investasi meningkat dari 9768 orang menjadi 25283 orang.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diambil terkait dengan analisis kebutuhan investasi sektor-sektor ekonomi unggulan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

Beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Surakarta demi kemajuan daerah dalam rangka memajukan pembangunan Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor ekonomi unggulan harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kebijakan pembangunan sektoral daerah dengan memprioritaskan pada sektor-sektor ekonomi unggulan melalui :

- Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Melakukan promosi pariwisata dengan mengadakan *event* budaya seperti Solo batik *carnival* sehingga menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga meningkatkan produktivitas Sektor perdagangan, hotel dan restoran.
 - Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun sistem informasi secara *online* pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sehingga dapat menarik pengguna pelayanan jasa dari daerah lain.
2. Dalam mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan antara lain adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan meningkatkan investasi dengan cara :
- Meningkatkan investasi pemerintah dengan menambah pengeluaran pemerintah dalam belanja modal dan penyertaan modal.
 - Meningkatkan investasi swasta dengan upaya untuk lebih menarik investor agar menanamkan modalnya pada sektor-sektor ekonomi unggulan dengan menciptakan daya tarik investasi antara lain : mempermudah perijinan, memperbaiki infrastruktur dan perbaikan iklim usaha.
3. Menyerap kesempatan kerja dengan meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kota Surakarta dengan memberikan pelatihan untuk

meningkatkan *soft skill* sehingga pertumbuhan ekonomi yang pesat akan dinikmati oleh masyarakat Kota Surakarta.



DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Made. 2007. Analisis kebutuhan investasi sektor basis dan non basis dalam perekonomian regional Bali. *Jurnal SOCA*, Vol. 7, No.2.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Jawa Tengah dalam angka 2007*.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Surakarta dalam angka 2007*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Profil Ketenagakerjaan 2007*. Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2007*.
- Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Daerah. 2008. *ICOR Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Kabupaten Bandung.
- Bank Indonesia. 2009. *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Tengah*. Vol. 9 No.10 ISSN 1411-7363. Semarang : Kantor Bank Indonesia.
- Fakultas Ekonomi UNS. 2003. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Imelia, Amelia. 2006. *Modul Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Irawan, dan Suparmoko. 1997. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanani, Nuhfil dan Iwan Nugroho. 2004. Kebutuhan Investasi untuk Pengembangan Sektor Pertanian: Suatu pendekatan input-output. *Jurnal AGRIVITA*, Vol.26, No.2.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Nugroho, Iwan. 2007. Pengembangan Dan Kebutuhan Investasi Sektor Air Bersih Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Litbang Kebijakan*, Vol.1.

- Nugroho, Iwan dan Nuhfil Hanani. 2007. Studi Investasi untuk Pengembangan Komoditi Pertanian di Propinsi Lampung: Pendekatan input-output. *Jurnal Ekonomi*, Vol.12, No.1.
- Purwanti, Putu Ayu P. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli Dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Jurnal Piramida*, Vol.V, No.1.
- Simanjuntak, Payaman S. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.
- Sobri. *Ekonomi Makro*. 1987. Yogyakarta : BPFE Universitas Islam Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta : LPFE UI.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Swasono, Yudo, Endang S. 1987. *Metode Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.